

# RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2023



**KANTOR KECAMATAN SARANG  
KABUPATEN REMBANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjukNYA, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Kecamatan Sarang Tahun 2023 berpedoman Renstra Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Selain itu dalam Perubahan Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Sarang Tahun 2022 dan tahun 2023 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023,

kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Sarang, 8 September 2023



**CAMAT SARANG**

**NASATON ROFIQ,SH**

Pembina Tk. I

NIP.19720209 199112 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023 digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2023 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

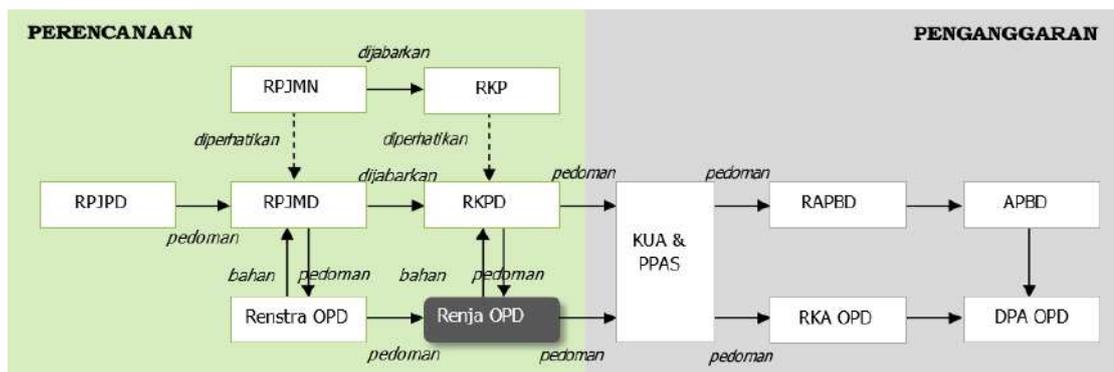
Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja

sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perubahan Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah berupa evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2023 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Semester I pada Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan terhadap Renja OPD  
Prinsip Penyusunan perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023:

1. Substansi Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian

target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut atas evaluasi Triwulan II/Semester I Dokumen Renja Kantor Kecamatan Sarang Tahun 2023.

3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
5. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Kemendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2023;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang secara berkesinambungan

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA -PPAS) Tahun 2023 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : Pendahuluan.  |
| BAB II  | : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang |
| BAB III | : Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang                               |
| BAB IV  | : Penutup.  |

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN SARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 sampai dengan Semester I. Selain itu, disajikan juga perkiraan capaian target Renstra Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sampai dengan Semester I Tahun 2023, berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

## **2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja  
Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2023 dan  
Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Sarang s/d Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah ) tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi ( %)	Proyeksi realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(9/4)*100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7,01	KECAMATAN									
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum		95	100					
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana		95	100					
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian		95	100					
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan		95	100					

		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>70</b>		100					
		<b>Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik</b>		<b>95</b>		100					
			<b>Nilai SAKIP OPD</b>		65	64,86	<b>65</b>	Na	-	65	<b>100</b>
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3		3	Na	Na	Na	Na	Na
		Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		1 Dok		1	Na	Na	Na	Na	Na
			% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100		100	20	20	100	<b>100</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3 dok		3 dok	2	1	49	Na	<b>Na</b>
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok		2 dok	1	50	2 dok	<b>67</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun		2 dok		2 dok	Na	Na	Na	Na	<b>Na</b>
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dok		2 dok	0	0	2 dok	<b>100</b>

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		2 dok		2 dok	Na	Na	Na	Na	Na
		Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		3 info		3 info	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 lap		6	3	50	100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		4 dok		4 dok	Na	Na	Na	Na	Na
			% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		100		100	100	100	100	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1 dok		1 dok	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 org		24 vorg	100	100	100	100
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		2 lap		2 lap	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok		12 dok	5	50	100	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun dengan kualitas baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun skpd	2 Lap	2		2	2	100	100	100

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik		10 dok		10 dok	Na	Na	Na	Na	Na
			% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		100		100	100	100	100	100
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Na		Na	Na	Na	3 dok	<b>100</b>
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			% pemenuhan pelayanan umum		100		100	100	100	100	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 pkt		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 pkt		Na	Na	Na	Na	Na
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan		100		100	Na	Na	Na	Na	Na

		kantor									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 pkt		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 pkt		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 pkt		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dok		Na	Na	Na	Na	Na
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 pkt		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur		100		100	Na	Na	Na	Na	Na

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 lap		12	6	50	12	<b>100</b>
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	100	100	100	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap		12	6	50	12	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 lap		12	6	50		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 lap		12	6	50	12	<b>100</b>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100		100	0	-	100	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% Ketercukupan Peralatan mesin lainnya		100		100	Na	Na	Na	Na	Na

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan</i>		5 unit		5	5	100	5	<b>100</b>
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>% Ketercukupan Gedung Kantor dan bangunan lainnya</i>		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			<i>Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan</i>		1 pkt		1	0	-	1	<b>100</b>
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			% BMD dengan kondisi Baik		100	100	100	85	85	100	<b>100</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 unit		18 unit	9 unit	50	18 unit	<b>100</b>
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27 unit		27 unit	13	50	27 unit	<b>100</b>
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	100	1	1	100	2 unit	100
	Penataan Organisasi	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		100		100	100	100	100	100
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan		1 dok		1 dok	1 dok	100	1 dok	100
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 dok		1	1	100	1	100
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>		7	7	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>		100	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na

			% penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100		100	100	100	100	<b>100</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 lap		6	6	100	6	<b>100</b>
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	70	70	100	70	30	40	100	<b>100</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 lap		1 lap	1 lap	100	1 lap	<b>100</b>
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		<b>7</b>		7	Na	Na	Na	Na	Na
			<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>		100		100	100	100	100	<b>100</b>
			<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>		3		3	2	67	3	<b>100</b>

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat desa/Kelurahan yang aktif		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100	100	100	71,4	71,4	100	<b>100</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir		70		70	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 lembaga		7	100	100	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang Ditindaklanjuti		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas		23 lap		23	23	100	23	<b>100</b>
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	Na	Na	Na	Na	Na
			<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>		100	100	100	67	67	67	67
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		<b>100</b>		100	Na	Na	Na	Na	Na

			Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum		100	100	100				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		23 lap	23	100,0	66,7	23,0	100,0	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind		23 lap	23	100	100	23	<b>100</b>	
7.01.04.2.0201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		23lap		23	100	100	23	100
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>		7		7	Na	Na	Na	Na	Na
			<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		100		100	0	-	100	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan		2 lap		0	0	-	100	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan		100		100	Na	Na	Na	Na	Na

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		40 org		40	0	-		0	-
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>7</b>		7	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>		100	100	100	65	65		100	<b>65</b>
7.01.062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola		100		100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		100		100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Rata-rata IKM Desa		70	100	70	0	-		0	-
7.01.062.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola		100		100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		100		100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		23 dok		23	12	50		23	-

7.01.062.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		100		100	Na	Na	Na	Na	Na
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		23 dok		23	23	100	23	<b>100</b>



Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan semester satu tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Semester Satu Tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 9 indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target
  - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 9 indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target
  - c) Dari 14 indikator kinerja kegiatan masih dalam proses pencapaian target.

## **2.2. Analisis Kinerja dan Keuangan Semester I Tahun 2023 Kantor Kecamatan Sarang**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2023 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.





7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	50	5.000.000	0	0
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	2.069.373.100	889.820.227	42,99
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	100	1.994.473.100	865.920.227	43,41
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	6	50	69.993.000	23.500.000	33,57
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	5.000.000	400.000	8
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					8.150.000	6.025.000	73,92
				1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					8.150.000	6.025.000	73,92
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	100	50	83.475.000	47.135.450	56,46
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	6	50	5.000.000	2.700.000	54

7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	6	50	10.000.000	3.750.000	37,50
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	6	50	34.450.000	16.900.000	49,05
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6	50	6.525.000	3.300.000	50,57
7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	6	50	15.000.300	9.264.340	61,76
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50	12.500.000	4.500.000	36
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	-	<b>13.050.000</b>	<b>13.050.000</b>	100
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Meubel	Jumlah Unit meubel yang Disediakan	100	100		<b>13.050.000</b>	<b>13.050.000</b>	100
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan						
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan						

7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	100	100	155.600.000	86.685.480	55,71
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	50	15.200.000	2.210.480	14,54
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	6	50			
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	50	140.400.000	84.475.000	60,16
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	100	85	85	16.000.000	9.176.350	57,35
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	9	50	10.000.000	5.096.350	50,96

7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	27	100	5.000.000	4.080.000	81,60
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	100	100	100	20.000.000	4.100.000	20,50
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	10.800.000	1.850.000	17,12
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wil kec	6	6	100	10.800.000	1.850.000	17,12
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	70	40	40	9.200.000	2.250.000	24,45
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 lap	1 lap	100	9.200.000	2.250.000	24,45

7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	40	40			56,45
						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	3	3	67	123.750.000	69.868.960	3
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	123.750.000	69.868.960	56,45
7	1	3	02.01	1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	7	7	100	35.000.000	31.150.000	89
7	1	3	02.01	3	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas</i>	23	23	100	88.750.000	38.718.960	43,62
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	67	67	39.450.000	5.237.500	13,27
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	67	67	39.450.000	5.237.500	13,27

7	1	4	02.01	1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 lap	1	100			
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	0	-			
7	1	4	02.02	1	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind</i>	1	1	100			
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	0	-	24.225.000	0	0
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	2	0	-	24.225.000	0	0

7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	0	-	24.225.000	0	0
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	100	65	65	<b>125.800.000</b>	5.225.000	4,15
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	<b>70</b>	0	-	<b>125.800.000</b>	<b>5.225.000</b>	4,15
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	23	100	2.000.000	1.000.000	50
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang dihasilkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23	23	100	37.800.000	1.800.000	4,76
7	1	6	02.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23	23	100	56.000.000	2.425.000	4,33
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	23	23	100	15.000.000	0	
7	1	6	02.01	7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23	23	100	5.000.000	0	0
7	1	6	02.01	8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23	23	100	5.000.000	0	0



APBD induk Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 56 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. **2.697.873.100**. Namun dengan adanya kebijakan penganggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 total anggaran Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang setelah perubahan menjadi Rp.**2.079.211.873**.

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2023 senilai Rp1.102.522.856 ( 40,86% ).

### **2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

Penyelenggaraan pelayanan Kantor Kecamatan Sarang adalah melaksanakan fungsi pelayanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sarang Kab. Rembang**  
**Triwulan II tahun 2023**

No	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisa
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Triwulan II tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	<b>Renstra 2021-2026</b>							
	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2	3,2	3,2	Na	3,2	Na	
	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	82,5	82,5	82,5	Na	Na	Na	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Sarang sampai dengan semester satu tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan. Dalam upaya mencapai Tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yaitu :

1. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sarang tahun 2023 yaitu 82,5 sedangkan pencapaiannya Na atau Na dari target karena sampai semester pertama belum melakukan survey Kepuasan Masyarakat

b. Sasaran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan selaras dengan RPJMD dengan indicator kinerja yaitu :

Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 target Kecamatan Sarang 82,5 terealisasi 82,5 (100%)

## **2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sarang yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat kinerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator urusan yang menjadi tujuan / sasaran strategis dan program sebagaimana pada tabel 2.1. tabel. 2.2 dan tabel 2.3 secara umum kinerja Kantor Kecamatan Sarang tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sarang maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sarang saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sarang adalah sebagai berikut :

## **1. Bidang Pemerintahan**

### **a. Kondisi**

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa Belum efektifnya pengawasan melekat.
3. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan.
4. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

### **b. Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

## **2. Bidang Ekonomi**

### **a. Kondisi Ekonomi**

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.

5. Potensi industri kecil terutama hasil laut.
6. Potensi budidaya hasil laut.

**b. Permasalahan**

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasii data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

**3. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

**a. Kondisi Saat ini**

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

**b. Permasalahan**

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

**4. Bidang Sosial Budaya**

**a. Kondisi Saat Ini**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih terbatasnya Lapangan Kerja.
4. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
5. Masih banyaknya kasus penyakit menular;

6. Masih adanya kasus gizi buruk
7. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni / Pathol
8. Masih rendahnya tingkat SDM di Kecamatan Sarang

**b. Permasalahan**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya angka pengangguran di Kecamatan Sarang
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan PHBS.
4. Rendahnya minat Generasi muda dalam berwirausaha.
5. Masih rendahnya tingkat Pendidikan di Masyarakat.

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sarang yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sarang sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Sarana dan Prasarana Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energy	Perubahan alih fungsi lahan	

#### D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, antara lain :

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sarang serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sarang Tahun 2023, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sarang kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

##### a. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparaturn pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak ( 23 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

**b. Peluang**

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketertiban dan ketertiban umum;

4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

#### E. Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sarang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah,

epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sarang adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sarang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sarang pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3889 tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, atau terdapat penyesuaian. pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  
2023 Pemerintah kabupaten Rembang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Kantor Kecamatan Sarang	Nilai Sakip OPD		
A.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
A.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108.000.000	

## **2.6 Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2023**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD 2021-2026, juga mengacu pada Perubahan RKPD Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Tema RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.

Prioritas RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- 3) Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- 4) Peningkatan Perekonomian dengan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- 5) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
- 6) Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 7) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
- 8) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- 9) Percepatan Kemandirian Desa

Prioritas tersebut mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan memperhatikan keselarasan terhadap RKP Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



Tabel 2.4

## Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	Kec. Sarang			<b>2.697.873.100</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	Kec. Sarang			<b>2.697.873.100</b>	
	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.697.873.100</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.697.873.100</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>85,5</b>	<b>2.364.648.100</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>65</b>	<b>2.364.648.100</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	20.000.000	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)</i>	1	10.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)</i>	1	10.000.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2	5.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2	5.000.000	

	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2	5.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	2.069.373.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	2.069.373.100
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25	1.994.473.100	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25	1.994.473.100
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6	69.900.000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6	69.900.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	5.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	5.000.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>%Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	100	8.150.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>%Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	100	8.150.000
	<i>Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	2	8.150.000	<i>Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	2	8.150.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	100	83.475.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	100	83.475.000	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1	5.000.000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1	5.000.000	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1	10.000.000	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1	10.000.000	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1	34.450.000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1	34.450.000	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1	6.525.000	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1	6.525.000	
	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>		<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	12	15.000.000	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>		<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	12	15.000.000	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12.500.000	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12.500.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	13.050.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	13.050.000	
	<i>Pengadaan Mebel</i>		<i>Jumlah Unit mebel yang Disediakan</i>	4	13.050.000	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan</i>	5	13.050.000	
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan</i>			<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan</i>			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	155.600.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	155.600.100	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	15.200.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	15.200.000	
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	0	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	0	

	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	140..400.000	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	140..400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	15.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	15.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	18	10.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	18	10.000.000
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	27	5.000.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	27	5.000.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	2	0	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	2	0
	Penataan Organisasi		% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	0	Penataan Organisasi		% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	0

	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>		<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan</i>	1	0	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>		<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan</i>	1	0
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	1	0	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	1	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	100	20.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	100	20.000.000
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100	10.800.000	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100	10.800.000
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wil kec</i>	6	10.800.000	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wil kec</i>	6	10.800.000
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		<i>Persentase PemDes yang lunas bayar PBB</i>	70	9.200.000	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		<i>Persentase PemDes yang lunas bayar PBB</i>	70	9.200.000

	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1	8.200.000	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1	8.200.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100	<b>123.750.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100	<b>123.750.000</b>
			<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</b>	3				<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</b>	3	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	123.750.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	123.750.000
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	12	35.000.000	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	12	35.000.000
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas</i>	23	88.750.000	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas</i>	23	88.750.000

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	100	39.450.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	100	39.450.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100	39.450.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100	39.450.000
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	23	39.450.000	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	23	39.450.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	0

	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind</i>	23	0		<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind</i>	23	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum</b>	100	24.225.000		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum</b>	100	24.225.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	2	<b>24.225.000</b>		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	2	<b>24.225.000</b>

	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100	24.225.000		<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100	24.225.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	100	125.800.000		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	100	125.800.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	70	125.800.000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	70	125.800.000	
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	23	2.000.000		<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	23	2.000.000	

	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	23	37.800.000	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	23	37.800.000
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka</i>	23	56.000.000	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka</i>	23	56.000.000
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa</i>	23	15.000.000	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	3 dok	15.000.000
	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	23	10.000.000	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	23	10.000.000
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Partisipatif</i>	46	5.000.000	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Partisipatif</i>	23	5.000.000

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

#### **3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **A. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sarang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

##### **B. Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sarang selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kecamatan Sarang.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sarang.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Berikut adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026:

**Tabel 3.1.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Sarang

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5
2		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	81,88	82,50	82,5	82,75	83	83,25	83,5

Adapun rincian program dan kegiatan rancangan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya Pelayanan Publik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penataan Organisasi

**II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

**III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

**VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah program dan kegiatan untuk Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023 adalah sejumlah 6 program serta 15 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp. **2.697.873.100**. dengan pengurangan pagu anggaran senilai Rp. **2.079.211.873** ( 77,06%) dari pagu induk.

Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut :





7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Kec. Sarang	3							3	
						Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		Kec. Sarang	1							3	
						% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Sarang	100	100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DAU	###	15.207.500	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Kec. Sarang	2								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec. Sarang	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU	2	6.996.000	
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun		Kec. Sarang	2								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sarang	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU	2	5.949.000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		Kec. Sarang	7							
						Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		Kec. Sarang	3							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Sarang	6	6	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU	6	5.262.500
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		Kec. Sarang	4							
						% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		Kec. Sarang	100	100	2.308.233.000	2.069.373.100	2.069.373.100	DAU		2.515.616.400

7	1	1	02.0 2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kec. Sarang	1								
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sarang	25	25	2.233.333.000	1.994.473.100	1.994.473.100	DAU		1	2.433.124.100
7	1	1	02.0 2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		Kec. Sarang	2								
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sarang	12	12	69.900.000	69.900.000	69.900.000	DAU		12	76.992.300

7	1	1	02.0 2	5		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun dengan kualitas baik		Kec. Sarang	1								
							<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		Kec. Sarang	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU		1	5.500.000
						<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	100								
							% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	100	100	12.000.000	8.150.000	8.150.000				103.950.000
						<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		Kec. Sarang	3	3	12.000.000	8.150.000	8.150.000			3	103.950.000

7	1	1	02.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		Kec. Sara ng	100								
							% pemenuhan pelayanan umum	Kec. Sara ng	100	100	95.000.000	83.475.000	83.475.000	DAU	###	96.980.95 0	
7	1	1	02.0 6	1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja		Kec. Sara ng	100								
							<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kec. Sara ng	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU	12	5.541.415	
7	1	1	02.0 6	3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor		Kec. Sara ng	100								

								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Saranng	1	1		10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU		12	10.991.915	
7	1	1	02.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor		Kec. Saranng	100										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Saranng	1	1		35.000.000	34.450.000	34.450.000	DAU		12	45.672.000	
7	1	1	02.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		Kec. Saranng	100										
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Saranng	1	1		7.000.000	6.525.000	6.525.000	DAU		12	9.475.290	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		Kec. Saranng	100										

							Jumlah Paket Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Sarang	1	1	0						12		
7	1	1	02.06	7		Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sarang	100										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Sarang	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU			12	15.400.330	
7	1	1	02.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sarang	100										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sarang	120	120	23.000.000	12.500.000	12.500.000	DAU			12	19.900.000	
7	1	1	02.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sarang	100										
							% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sarang	100	100	148.000.000	13.050.000	13.050.000	DAU			###	187.000.000	





7	1	1	02.0 9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	1									
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sarang	18	18		10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU		18	10.247.600
7	1	1	02.0 9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	1									
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sarang	27	27		5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU		27	5.400.000
7	1	1	02.0 9	#		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	1									

								<i>Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kec. Sarang	1	1									1		7.700.000
									Kec. Sarang			30.000.000	0	0	DAU							
7	1	1	02.13			Penataan Organisasi	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	100												
							% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	100	100	0	0	0	DAU		###					4.972.000
7	1	1	02.13	1		<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		Kec. Sarang	100												
								<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	Kec. Sarang	1	1	0	0	0	DAU						1	627.000
7	1	1	02.13	5		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik		Kec. Sarang	100												

										Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Sarang	1	1	0	0	0	DAU	1	4.345.000	
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan		Kec. Sarang	7										
								Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Kec. Sarang	100	100	30.000.000	20.000.000	20.000.000	DAU		###		113.300.000	
7	1	2	02.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		Kec. Sarang	100										
								% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sarang	100	100	10.800.000	10.800.000	10.800.000	DAU		###		113.300.000	
7	1	2	02.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Sarang	100										



								Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Kec. Sarang	100	100	95.000.000	123.750.000	123.750.000	DAU		###	101.997.500	
								Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Kec. Sarang	3	3								
7	1	3	02.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat desa/Kelurahan yang aktif		Kec. Sarang	100									
							% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		Kec. Sarang	100	100	95.000.000	123.750.000	123.750.000	DAU		###	101.997.500	
7	1	3	02.01	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir		Kec. Sarang	70									



7	1	4	02.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketertaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		Kec. Sarang	100								
							Persentase penyelesaian permasalahan Ketertaraman dan Ketertiban umum	Kec. Sarang	100	100	45.000.000	39.450.000	39.450.000	DAU	###	55.594.000	
7	1	4	02.0 1	1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Persentase penyelesaian permasalahan Ketertaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		Kec. Sarang	100								
							<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Sarang	23	23	45.000.000	39.450.000	39.450.000	DAU	23	53.944.000	

7	1	4	02.0 2			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		Kec. Sarang	100								
								Persentase penyelesaian permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sarang	100	100	0	0	0	DAU		###	1.650.000
7	1	4	02.0 2	1		<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		Kec. Sarang	100								

								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind	Kec. Sarang	23	23	0	0	0	DAU		23	1.650.000	
7	1	5						<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		7								
								Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Sarang	100	100	30.000.000	24.225.000	24.225.000	DAU		###	22.257.400	
7	1	5	02.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100								
								Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Sarang	2	2	30.000.000	24.225.000	24.225.000	DAU		2	22.257.400	

7	1	5	02.0 1	1	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan			100										
									Kec. Sarang										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sarang	40	100	30.000.000	24.225.000	24.225.000	DAU	###	22.257.400
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		Kec. Sarang	7							
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik		Kec. Sarang	100	100	77.500.000	125.800.000	125.800.000	DAU	###	35.200.000

7	1	6	02.0 1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola		Kec. Sara ng	100									
							Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		Kec. Sara ng	100	100								
								Rata-rata IKM Desa	Kec. Sara ng	70	70	77.500.000	125.800.000	125.800.000	DAU		70	35.200.00 0	
7	1	6	02.0 1	2		<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola		Kec. Sara ng	100									
							Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		Kec. Sara ng	100									
								<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kec. Sara ng	23	23	5.000.000	2.000.000	2.000.000	DAU		23	13.200.00 0	
7	1	6	02.0 1	4		<i>Fasilitasi Penegelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset</i>			Kec. Sara ng	100									



									Kec. Sarang										
									Kec. Sarang										
									Kec. Sarang										
									Kec. Sarang										
									Kec. Sarang										
									Kec. Sarang										

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **8.1 Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kantor Kecamatan Sarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kantor Kecamatan Sarang;
3. Penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **8.2 Kaidah | Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

### 8.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2023 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2023.

Sarang, 8 September 2023

  
**CAMAT SARANG**  
  
**NASATON ROFIQ,SH**  
Pembina TK.I  
NIP. 19720209 199112 1 001

Renja Perubahan KECAMATAN SARANG Kabupaten Rembang Tahun 2023

